

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA SEDEKAN RIVER TUBING SUNGAI CILEUEUR DI DESA MEKARJADI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS

Adam Firdaus Pramana Putra

Universitas Galuh

Asep Nurwanda

Universitas Galuh

Kiki Endah

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Galuh

Jln. RE Martadinata No 150 Ciamis Fisip Universitas Galuh

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peran Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur Di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Peran Pemerintah Desa Mekarjadi dalam mengembangkan potensi wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur belum berjalan secara optimal, karena Pemerintah Desa Mekarjadi belum memiliki perencanaan pengembangan wisata yang komprehensif dan tertuang dalam dokumen perencanaan desa secara terstruktur. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi wisata juga masih minim, tidak dikelola secara profesional dan belum dijadikan prioritas dalam strategi promosi desa. Dukungan pemerintah desa terhadap kebutuhan sarana-prasarana, pelatihan sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan wisata masih terbatas. 2) Terdapat sejumlah hambatan yang menyebabkan peran Pemerintah Desa belum berjalan secara optimal yaitu adanya keterbatasan anggaran desa yang dialokasikan untuk sektor pariwisata. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pariwisata. Belum tersusunnya perencanaan strategis yang secara khusus memprioritaskan sektor wisata dalam dokumen perencanaan desa seperti dalam RPJMDes atau RKPDes. 3) Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut pemerintah desa melakukan berbagai upaya yang antara lain : mendorong partisipasi masyarakat melalui pendekatan musyawarah desa dan sosialisasi mengenai pentingnya pengembangan wisata sebagai sumber pendapatan alternatif. Pemerintah Desa berupaya mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa yang diberi mandat untuk mengelola kegiatan wisata. Pemerintah Desa mulai memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan wisata Sedekan River Tubing kepada publik

Kata Kunci : *Peran, Pemerintah Desa, Potensi Wisata, Sedekan River Tubing.*

PENDAHULUAN

Salah satu potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) saat ini adalah sektor pariwisata. Karena berbagai keunikannya, wisata di desa kini menjadi

pilihan utama para wisatawan. Saat ini, tempat wisata di pedesaan sangat populer dan disukai karena tidak hanya menampilkan keindahan alam, tetapi juga memungkinkan wisatawan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan penduduk desa. Oleh karena itu penawaran wisata dikembangkan sesuai dengan keinginan khusus dan lokasi tertentu yang disebut desa wisata

Oleh karena itu pengelolaan potensi wisata merupakan peluang untuk meningkatkan pembangunan desa yang akan menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran warganya. Dalam pengembangan destinasi wisata ini perlu adanya peran aktif dari pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah desa sebaiknya memaksimalkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan wisata baik itu secara fisik maupun non fisiknya sehingga menjadi objek wisata unggulan serta dapat menarik para wisatawan untuk datang ke objek wisata.

Dengan adanya objek wisata, maka hal itu dapat membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lokasi wisata sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk lebih mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dengan menawarkan jasa dan menjual barang-barang yang terbuat dari banyak potensi desa.

Oleh karena itu Pemerintah Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pengembangan objek wisata dan menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. (Iswanti, 2022).

Akhir-akhir ini pariwisata menjadi salah satu sektor yang gencar untuk ditingkatkan di Indonesia. Sebab melalui segala kegiatan pengembangan dari sektor pariwisata pada akhirnya dapat menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya terlebih pada sektor ekonomi. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang mampu mendatangkan devisa bagi negara melalui kedatangan para wisatawan setelah sektor pertambangan minyak bumi serta gas alam, apabila dikembangkan secara berkelanjutan maka dapat membantu dalam hal peningkatan devisa negara itu sendiri yang mana hal tersebut akan membawa dampak baik pada pertumbuhan ekonomi negara sehingga dapat membantu proses pembangunan nasional ataupun daerah. Oleh karena itu, seiring dengan perjalanan waktu timbullah berbagai macam tren yang berhubungan dengan pengembangan sektor kepariwisataan itu sendiri. Sebagai salah satu contohnya dapat dilihat berkembangnya tren yang berkaitan dengan pembangunan potensi wisata.

Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tren dikarenakan banyaknya desa-desa yang ada di Indonesia ini menginginkan desanya untuk dapat ditetapkan menjadi sebuah desa wisata. Kesadaran akan perubahan tren kepariwisataan yang dulunya lebih pada pariwisata massal dengan pola dimana jumlah wisatawan yang mendatangi suatu destinasi wisata yang telah populer secara bersamaan dan dalam jumlah yang besar, kemudian beralih ke pariwisata alternatif dengan lebih mengedepankan destinasi yang kurang dikunjungi secara tradisional, dengan fokus pada kelestarian lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, dan penghormatan terhadap budaya dan tradisi masyarakat setempat yang mencakup berbagai jenis pengalaman, termasuk ekowisata, tur budaya, petualangan alam, homestay di komunitas lokal, dan berbagai bentuk pariwisata berkelanjutan lainnya. Semua hal tersebut kemudian membuat banyaknya desa memanfaatkan peluang yang ada untuk membentuk sebuah desa wisata di wilayahnya.

Adapun hal yang membedakan tren pariwisata alternatif ini dengan pariwisata minat khusus, serta pariwisata berbasis komunitas ialah fokus kegiatan pariwisata

alternatif lebih menekankan pada kelestarian lingkungan, keunikan budaya, serta interaksi yang mendalam dengan destinasi wisata contohnya ekowisata, tur budaya, serta petualangan alam. Sedangkan pariwisata minat khusus berfokus pada kegiatan atau minat dari wisatawannya itu sendiri seperti aktivitas pariwisata kuliner ataupun pariwisata sejarah dan terkait pariwisata berbasis komunitas akan lebih menekankan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan dari industri pariwisata itu sendiri dengan tujuan memberdayakan komunitas lokal secara ekonomi, sosial budaya.

Pembangunan desa wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah diharapkan dapat membawa kemajuan terhadap berbagai program wisata tidak hanya pengelolaan dan pembangunan, namun juga keterlibatan masyarakat di dalamnya, menerapkan strategi pembangunan pariwisata dengan kearifan lokal dan mengikutsertakan masyarakatnya. Dalam hal ini program pembangunan pariwisata yang dicanangkan oleh pemerintah ditanggapi dengan baik oleh masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurwanda (2018:14) yang menyatakan bahwa : Kegiatan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui roda perekonomian sebagai dampak dari kegiatan industri pariwisata. Sehingga pariwisata merupakan semua kegiatan manusia yang dilakukan untuk berkunjung ke suatu tempat wisata yang bertujuan untuk mendapatkan ketenangan dan pariwisata sebagai industri yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui roda perekonomian industri pariwisata itu sendiri.

Kabupaten Ciamis memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan menjadi objek wisata alam. Empat tahun belakang ini Kabupaten Ciamis terus mengalami perkembangan yang pesat terlebih lagi di bidang pariwisata. Tempat-tempat baru bermunculan tidak saja dari daerah yang berada dipinggiran kota, namun juga dari daerah-daerah pegunungan yang panorama alam yang indah serta memiliki keunikan dan ciri khasnya sendiri. Salah satunya objek wisata yang ada di daerah Kecamatan Sadananya tepatnya di desa Mekarjadi.

Desa Mekarjadi merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yang memiliki 3 Dusun yaitu Dusun Cimamut, Dusun Kereteg dan Dusun Sedekan. Desa Mekarjadi memiliki beragam potensi baik pertanian, perikanan namun potensi wisata.

Salah satu potensi wisata yang ada di Desa Mekarjadi adalah potensi wisata air yaitu Sedekan River Tubing Sungai Cileueur yang memanfaatkan aliran Sungai Cileueur yang sumber mata airnya langsung dari Gunung Sawal. Kondisi airnya cukup jernih dan deras apabila setelah turun hujan. Panjang jarak tempuh sekitar 2,5 kilometer atau memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk sampai finis. Kondisi trek yang dilalui cukup menantang dan berkelok, sedikitnya ada tujuh jeram yang akan membawa keseruan wisatawan seperti terbawa hanyut aliran sungai. Pada saat ini objek wisata Sedekan River Tubing dikelola oleh Karang Taruna Desa Mekarjadi.

Perkembangan objek wisata Sedekan River Tubing mengalami peningkatan jumlah pengunjung hal ini tidak lepas dari kreativitas karangtaruna dalam mengemas objek wisata dan melakukan promosi menggunakan media sosial sehingga banyak yang tertarik untuk mengunjunginya. Namun permasalahan yang ada antara lain permasalahan akses masuk yang menggunakan jalan milik warga sementara pemerintah desa kurang memberikan perhatian dalam membantu pengembangan potensi wisata sehingga perkembangannya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Namun demikian berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Belum adanya regulasi atau aturan berupa Peraturan Desa Mengenai pengembangan potensi Wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur sehingga tanggungjawab pengelola potensi wisata sedekan river belum optimal karena ketidakjelasan peran dan tanggungjawabnya.
2. Kurangnya peranan pemerintah desa mendukung ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan potensi Wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur sehingga masih kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada wisatawan yang datang.
3. Kurangnya musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengembangan objek Wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur. Hal ini dibuktikan dengan adanya konflik antar pemilik lahan yang lahannya dipergunakan untuk jalan tanpa adanya permohonan penggunaan jalan untuk menuju objek wisata.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Peran Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis”**.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitik. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Mekarjadi, Ketua BPD, Ketua LPM, Direktur Bumdes dan 3 orang tokoh masyarakat sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, berikut ini penulis melakukan penelitian yang hasilnya sebagai berikut :

1. Peran selaku stabilisator

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan dimensi Peran selaku stabilisator dengan indikatornya Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengembangan objek wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur dan Pemerintah Desa mendorong masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan potensi objek wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum optimal. upaya pelibatan masyarakat memang telah dilakukan melalui musyawarah desa dan sosialisasi. Namun, keterlibatan tersebut cenderung bersifat informatif dan belum menyentuh aspek partisipasi aktif, seperti pengambilan keputusan dan inisiatif program dari masyarakat sendiri. Selain itu, dorongan Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk mengelola potensi wisata juga belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang signifikan. Hal ini terlihat dari belum terbentuknya struktur pengelola wisata yang kuat, minimnya pelatihan teknis bagi warga, serta keterbatasan dalam pengembangan usaha wisata berbasis komunitas. Padahal, peran stabilisator

seharusnya mencerminkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menjaga keseimbangan sosial dengan menciptakan keterlibatan masyarakat yang adil dan berkelanjutan dalam pembangunan lokal.

Menurut pendapat Kusnadi (2013:45) menyatakan bahwa : Pemerintah desa sebagai aktor lokal memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola dinamika sosial masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya akibat pembangunan. Dalam konteks pariwisata, peran stabilisator diwujudkan melalui pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, agar pembangunan tidak hanya bersifat *top-down*.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian peran pemerintah desa selaku stabilisator karena pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan wisata masih terbatas, dan dorongan kepada masyarakat untuk mengelola serta mengembangkan potensi wisata belum menghasilkan partisipasi yang kuat dan berkelanjutan. Masyarakat sebagian besar masih berperan sebagai objek, bukan sebagai subjek pembangunan, yang bertentangan dengan prinsip partisipatif. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa sebagai stabilisator belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan harapan normatif. Kelemahan dalam pemberdayaan, koordinasi, serta pembentukan kelembagaan pengelola wisata mencerminkan masih lemahnya fungsi fasilitasi dan stabilisasi sosial yang seharusnya menjadi peran utama pemerintah desa dalam pembangunan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan strategi, khususnya dalam penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas perencanaan, serta pembentukan kelembagaan pengelola wisata yang representatif dan inklusif. Dengan langkah-langkah tersebut, peran stabilisator pemerintah desa diharapkan dapat diwujudkan secara lebih nyata dalam proses pembangunan objek wisata desa yang berkelanjutan.

2. Peran selaku inovator

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan dimensi peran selaku inovator dengan indikatornya Pemerintah desa melakukan penataan objek wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur dan Pemerintah melibatkan Pokdarwis untuk bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat dalam mengembangkan objek wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur diketahui belum optimal karena Penataan fisik seperti akses jalan, fasilitas pendukung, serta promosi wisata belum dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pokdarwis masih bekerja dengan keterbatasan sumber daya, tanpa didukung oleh perencanaan inovatif atau pelatihan berbasis kebutuhan wisatawan. Di sisi lain, kerja sama antara Pokdarwis dan lembaga masyarakat seperti LPM, Karang Taruna, dan Bumdes belum dibentuk dalam sistem yang solid dan berkelanjutan. Tidak adanya forum khusus atau tim kerja gabungan menjadi salah satu hambatan dalam mendorong kerja kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa peran inovatif Pemerintah Desa dalam menciptakan ide-ide baru, merancang model pengelolaan wisata yang kolaboratif, serta mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat masih belum terlaksana secara maksimal.

Menurut pendapat Dwiyanto (2006:148), menyatakan bahwa : Inovasi dalam pemerintahan desa merupakan bagian dari upaya menciptakan nilai tambah melalui cara-cara baru dalam pelayanan publik dan pembangunan berbasis potensi lokal. Pemerintah desa harus mampu menginisiasi ide, metode, dan pendekatan baru agar pembangunan desa tidak bersifat monoton dan rutin, tetapi progresif dan adaptif terhadap perubahan.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian peran Pemerintah Desa selaku inovator dalam

pengembangan objek wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur. Peran ideal pemerintah desa sebagai inovator menuntut adanya kemampuan untuk menciptakan gagasan baru, mendorong kolaborasi kelembagaan, serta melakukan pembaruan dalam penataan dan pengelolaan potensi lokal secara kreatif dan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, seperti yang ditunjukkan oleh hasil wawancara dan observasi, Pemerintah Desa Mekarjadi belum secara maksimal mewujudkan inovasi dalam hal penataan objek wisata maupun dalam membangun sinergi antara Pokdarwis dan lembaga masyarakat lainnya.

3. Peran selaku modernisator

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan dimensi Peran selaku modernisator dengan indikatornya Pemerintah Desa meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola objek wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur dengan Pemerintah Desa menyampaikan target dalam pengembangan objek wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur belum optimal karena Pemerintah Desa Mekarjadi belum secara maksimal melaksanakan program-program peningkatan kapasitas bagi para pengelola wisata. Pelatihan atau pembinaan yang bersifat teknis maupun manajerial masih sangat terbatas, sehingga pengelola wisata belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola potensi wisata secara profesional. Tidak adanya pendampingan rutin atau kerja sama dengan lembaga pelatihan turut menjadi faktor penghambat dalam proses pengembangan kapasitas tersebut. Selain itu Pemerintah Desa belum menyusun dan menyampaikan target pengembangan wisata secara sistematis dan terbuka. Informasi mengenai arah kebijakan, tahapan pengembangan, dan target capaian wisata belum disampaikan secara luas kepada masyarakat maupun pengelola. Hal ini menyebabkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan jangka pendek maupun jangka panjang dari pembangunan objek wisata, serta menghambat partisipasi aktif dari berbagai unsur lokal.

Menurut pendapat Mardikanto dan Soebianto (2012: 134) menyatakan bahwa : Salah satu ciri utama dari pemerintah desa yang modern adalah kemampuan untuk menyampaikan visi, misi, dan target pembangunan secara jelas kepada masyarakat. Penyampaian target yang terstruktur tidak hanya mendorong transparansi, tetapi juga membangkitkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan bersama.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara peran ideal Pemerintah Desa sebagai modernisator dengan praktik yang terjadi di Desa Mekarjadi. Secara teoritis, peran modernisator menuntut Pemerintah Desa untuk mampu mendorong perubahan ke arah yang lebih maju melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyampaian target pembangunan secara jelas dan terstruktur. Namun, dalam kenyataannya, Pemerintah Desa Mekarjadi belum optimal dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola objek wisata serta belum menyampaikan target-target pengembangan wisata secara terbuka dan partisipatif. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang mampu memodernisasi tata kelola pembangunan desa, khususnya dalam pengembangan objek wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dan strategi yang terarah agar peran sebagai modernisator dapat terwujud secara nyata dan berdampak positif bagi masyarakat.

4. Peran selaku pelopor

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan dimensi Peran selaku pelopor dengan indikatornya Pemerintah Desa meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan objek

wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur dan Pemerintah Desa menjaga dan melestarikan kealamian objek wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya intensitas kegiatan kebersihan rutin yang difasilitasi oleh pemerintah desa, masih adanya sampah di sekitar kawasan wisata, serta minimnya fasilitas penunjang seperti tempat sampah dan papan informasi lingkungan. Selain itu, upaya pelestarian alam seperti menjaga vegetasi, aliran sungai, dan mencegah aktivitas wisata yang merusak alam belum dilakukan secara terstruktur dan konsisten. Sebagai pelopor, seharusnya pemerintah desa mampu menjadi teladan dan penggerak dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan wisata, baik melalui kebijakan, edukasi masyarakat, maupun kolaborasi dengan lembaga lokal. Fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa inisiatif yang dilakukan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan desa berbasis ekowisata.

Menurut pendapat Dwiyanto (2006:198), menyatakan bahwa : Peran pelopor dari institusi pemerintah lokal mencakup kemampuan untuk memberikan contoh yang baik (*role model*), membangun kepercayaan masyarakat, dan merangsang partisipasi warga dalam program-program pembangunan, termasuk dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian peran Pemerintah Desa Mekarjadi selaku pelopor dalam pengelolaan objek wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur, khususnya dalam meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan serta menjaga dan melestarikan kealamian lingkungan wisata. Hal ini karena Kegiatan kebersihan belum terjadwal secara rutin, pelibatan masyarakat belum optimal, dan belum terdapat kebijakan atau regulasi desa yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan kelestarian kawasan wisata. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas kepemimpinan desa, peningkatan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, serta strategi yang lebih partisipatif dan terstruktur dalam mewujudkan peran pelopor secara nyata di tengah masyarakat.

5. Peran selaku pelaksana sendiri

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan dimensi Peran selaku pelaksana sendiri dengan indikatornya Pemerintah Desa memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan objek wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur dan Pemerintah Desa memanfaatkan media sosial dalam mempromosikan objek wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur, belum optimal karena Pemerintah Desa belum menjalankan fungsinya secara optimal dalam hal pengembangan dan promosi objek wisata *Sedekan River Tubing*. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, perencanaan strategis, serta peningkatan kolaborasi dan inovasi promosi berbasis digital di tingkat desa.

Menurut pendapat Soetomo (2011:59), yang menyatakan bahwa : Pemerintah desa harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif, termasuk dalam sektor pariwisata desa. Ketika peran ini tidak dijalankan secara optimal, maka potensi lokal yang seharusnya dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial menjadi kurang berkembang.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan peran Pemerintah Desa selaku pelaksana dalam pengembangan dan promosi objek wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur. Secara normatif, Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memajukan potensi desa, termasuk sektor pariwisata, sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dalam praktiknya, ditemukan bahwa Pemerintah Desa belum menjalankan peran tersebut secara optimal. Indikator tanggung jawab dalam pengembangan objek wisata masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta belum adanya perencanaan jangka panjang yang terstruktur. Demikian pula pada aspek pemanfaatan media sosial, peran pelaksana belum tercermin dalam strategi komunikasi digital yang konsisten dan profesional.

Berdasarkan hasil penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis dari lima dimensi dan sepuluh indikator yang dijadikan alat ukur belum optimal karena pemerintah desa Mekarjadi masih menghadapi kendala dalam hal perencanaan strategis yang matang, alokasi anggaran yang memadai, serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan pariwisata. Selain itu, kurangnya koordinasi kelembagaan, minimnya keterlibatan masyarakat secara aktif, dan terbatasnya inovasi dalam promosi wisata, khususnya melalui media sosial, menjadi faktor penghambat lainnya. Meskipun ada upaya sporadis untuk mengembangkan destinasi wisata tersebut, namun belum terbangun sistem pengelolaan wisata yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan sehingga berdampak pada belum tergalinya potensi penuh dari objek wisata *Sedekan River Tubing*, yang seharusnya dapat menjadi salah satu daya tarik wisata unggulan desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Peran Pemerintah Desa Mekarjadi dalam mengembangkan potensi wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur belum berjalan secara optimal, karena Pemerintah Desa Mekarjadi belum memiliki perencanaan pengembangan wisata yang komprehensif dan tertuang dalam dokumen perencanaan desa secara terstruktur. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi wisata juga masih minim, tidak dikelola secara profesional dan belum dijadikan prioritas dalam strategi promosi desa. Dukungan pemerintah desa terhadap kebutuhan sarana-prasarana, pelatihan sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan wisata masih terbatas. Peran pemerintah desa dalam menjalin kerja sama lintas sektor belum berjalan dengan baik. Pemerintah Desa belum memiliki sistem evaluasi atau mekanisme pengawasan terhadap kegiatan pengembangan wisata yang dilaksanakan.

Terdapat sejumlah hambatan yang menyebabkan peran Pemerintah Desa belum berjalan secara optimal yaitu adanya keterbatasan anggaran desa yang dialokasikan untuk sektor pariwisata. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pariwisata. Belum tersusunnya perencanaan strategis yang secara khusus memprioritaskan sektor wisata dalam dokumen perencanaan desa seperti dalam RPJMDes atau RKPDes. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi wisata belum maksimal sehingga promosi masih bersifat insidental dan belum dikelola oleh tim yang memiliki pemahaman di bidang pemasaran digital. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan wisata juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Tidak adanya sistem evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap program wisata menyebabkan pemerintah desa kesulitan mengukur keberhasilan maupun mengidentifikasi hambatan yang muncul di lapangan.

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA SEDEKAN
RIVER TUBING SUNGAI CILEUEUR DI DESA MEKARJADI KECAMATAN SADANANYA
KABUPATEN CIAMIS**

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut pemerintah desa melakukan berbagai upaya yang antara lain : mendorong partisipasi masyarakat melalui pendekatan musyawarah desa dan sosialisasi mengenai pentingnya pengembangan wisata sebagai sumber pendapatan alternatif. Pemerintah Desa berupaya mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa yang diberi mandat untuk mengelola kegiatan wisata. Pemerintah Desa mulai memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan wisata Sedekan River Tubing kepada publik. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemerintah Desa juga melakukan pengajuan bantuan ke pemerintah kabupaten dan dinas pariwisata guna memperoleh dukungan dana dan program pendampingan. Pemerintah Desa mendorong pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola wisata dan karang taruna, agar memiliki pengetahuan dasar dalam pelayanan wisata, keamanan, dan pengelolaan lingkungan. Pemerintah Desa mulai mengaktifkan kembali forum-forum desa seperti rapat lintas lembaga, dan mendorong keterlibatan lembaga-lembaga desa seperti LPM dan Pokdarwis untuk bekerjasama merumuskan rencana jangka pendek dan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Alfianto, F. Y., & Fauzi, A. M. 2021. Peran Pemerintah Desa Dalam. Pengembangan Desa Wisata Pakuncen. E-Journal Unesa, 1–16.
- Amerta, I. M. S. 2019. Pengembangan Pariwisata Alternatif. Scopindo Media Pustaka.
- Arikunto, S. 2020. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka. Cipta.
- Danim, S. 2013. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung, Indonesia: Pustaka Setia.
- Ibrahim, M. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung.
- Moleong, L. J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Nawawi, H. 2018. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru) 1.Jakarta,. Rineka Cipta.
- Silalahi, Ulber. 2018. Metodologi Analisis Data dan Interpretasi Hasil untuk. Penelitian Sosial Kuantitatif. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Sumber Jurnal/Internet :

- Dintania Rambu Lohi Pani, 2024. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Umbu

***PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA SEDEKAN
RIVER TUBING SUNGAI CILEUEUR DI DESA MEKARJADI KECAMATAN SADANANYA
KABUPATEN CIAMIS***

Pabalkabupaten Sumba Tengah. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No.6, Juni 2023

Ismi Arifiana Rahmandari, 2024. Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Wisata Guna Meningkatkan Penghasilan Asli Desa Di Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Volume 2 Nomor 1, Juni 2024.

Nurwanda, Asep. 2018, Analisis Pengelolaan Curug Salosin Di Desa Sukahurip Kecamatan Cihaubeuti Kabupaten Ciamis. Jurnal Moderat, Volume 4, Nomor 3, Agustus 2018.

Susi Iswanti. 2022. Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir). Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 8, No. 1 / 2022.

Yusuf, I. 2014. Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa